

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Afiah, Ratna Nurul, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989).

Aprita, Serlika, Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, (Makassar: CV. Pena Indis, 2017).

Ginting, Elyta Ras, Hukum Kepailitan Buku Kesatu Teori Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

- Mahadi, Falsafah Hukum: Suatu Pengantar, (Alumni: Bandung, 2003).
- Makaraao, Mohammad Taufik, dan Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2007).
- Muhammad, Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).
- Mulyadi, Lilik, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik, (Bandung: Alumni, 2012).
- Purwoleksono, Didik Endro, Hukum Acara Pidana, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015).
- Prints, Darwan, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), (Jakarta: Djambatan, 1989).
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012),
- Ruslan, Rosady, Metode Penelitian, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).
- Simanjuntak, Nikolas, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Simorangkir, J.C.T. et.al, Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Sjahdein, Sutan Remy, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018).

Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

_____, Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3. (Jakarta: UI
Press, 1986).

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Sofyan, Andi dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi
Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Subhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di
Peradilan, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019).

Suparji, Kepailitan, (Jakarta: UAI Press, 2018).

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori
dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Wibowo, Kurniawan Tri, Hukum Acara Pidana Menggugat Kelemahan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Depok:
Papas Sinar Sinanti, 2020).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Panduan Bantuan Hukum di
Indonesia Edisi 2006, (Jakarta: Sentralisme Production, 2006).

Yuhassarie, Emmy (ed.), Undang-Undang Kepailitan dan
Perkembangannya, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Herzien Inlandsch Reglement

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Peraturan Lainnya/Surat Edaran

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016
tentang Majelis Kehormatan Notaris

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian
Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan
Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang di Pengadilan

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 021/A/JA.09/2015 tentang Sikap Jaksa
Menghadapi Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

D. Makalah, Artikel dan/atau Jurnal

Arif Budi Wibowo, “Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan
dalam Penyelesaian Perkara Pembunuhan di Pengadilan Negeri
Semarang”, (Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang: Semarang,
2005).

Aruan, Ukkap Marolop, “Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana
Menurut KUHAP”, Lex Crimen Vol. III No. 2, 2014, Universitas Sam
Ratulangi.

Ashari, A., “Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana”, Al Hikam
Vol. 1 No. 3, 2017, Universitas Muslim Indonesia.

Dandel, Danielo Chris Lawalata, “Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak
Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana”, Lex Crimen Vol. III No. 10 2018, Universitas Sam Ratulangi.

Nola, Luthvi Febryka, 2018, “Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan”, Negara Hukum Vol. 9 No. 2, DPR RI.

Simatupang, Pana, Kajian Yuridis Terhadap Peranan dan Tanggung jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, (Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara: Medan, 2006).

Syahrin, Elfirda Ade Putri Alvi, M. Ekaputra dan Chairul Bariah, 2016, “Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana (Money Laundering) Ditinjau dari Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Tempus Delicti) (Studi Putusan MARI No. 1195/K/PIDSUS/2014)”, USU Law Journal Vol. 4 No. 3 Juni 2016, Universitas Sumatera Utara.

Tirayo, Adriel Michael dan Yoefanca Halim, “Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 6 No. 2, 2019

E. Skripsi/Tesis/Disertasi

Rahman, Bagus, Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Dalam Harta Pailit (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015), 2017, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Setiawan, Dony Putra, Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit, 2017, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

F. Wawancara

Susetyo, Herman, Wawancara, Ungaran, (Semarang: 7 Februari, 2022)

Mahmudah, Siti, Wawancara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang), tanggal 17 Februari 2022)

G. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012

Putusan Pengadilan Nomor 66/Pid.Prap/2021/PN.JKT-SEL

Putusan Pengadilan Nomor 06/Pid.Prap/2020/PN Pbr

Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN. Niaga Jkt. Pst jo Nomor 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan No: 140/Pid.B/2015/PN.PWT

Putusan Pengadilan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Olm

Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Byw.